

**DAMPAK PERALIHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Kasus: Kampung Lembur Pasir, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)**

Oleh:

Aldo Pratama Widiyanto Essen¹, Poltak B Panjaitan² & Abdul Rahman Rusli³

Aldo Pratama Widiyanto Essen, Poltak B Panjaitan & Abdul Rahman Rusli³.2015
*Impact Of Transition Functions Of Forest On Social Conditions Economic
Community*

Jurnal Nusa Sylva Volume 15 No 1 Juni 2015: 1-10

ABSTRACT

Change region switch the function of limited production forest area of the reserve has implications for the shape of people's activities in the region are limited. This study aims to determine the impact of the transition Perhutani office production forests into conservation forest area of the National Park on the socioeconomic conditions of rural communities around the area hutan. Metode research is a case study where data collection is done by using questionnaires and in-depth interviews and analysis of descriptive data. The results showed the impact of transfer of forest land to the socio-economic conditions of rural communities around the forest area, the social aspects of a decline in the number of penggarap land and increasing types of livelihood (of 6 types to 13 types of livelihood) and from the economic aspect, noticeable decrease in the use of firewood by the head of each family as well as a decline in revenue on each head of family who make their livelihood as this penggarap. Implications for the various issues that arise in the community where it takes an intensive development program.

Keywords: The transition region functions, community, social and economic conditions

ABSTRAK

Perubahan kawasan yang beralih fungsi dari kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan konservasi berimplikasi pada bentuk aktifitas masyarakat pada kawasan tersebut yang menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak peralihan kawasan hutan produksi Perum Perhutani menjadi kawasan hutan konservasi Taman Nasional terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan hutan. Metode penelitian adalah studi kasus dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner dan wawancara mendalam serta analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tentang dampak peralihan kawasan hutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, yakni pada aspek sosial terjadi penurunan jumlah penggarap lahan dan meningkatnya jenis mata pencaharian (dari 6 jenis menjadi 13 jenis mata pencaharian) dan dari aspek ekonomi, terlihat penurunan pemanfaatan kayu bakar oleh tiap kepala keluarga serta terjadi penurunan pendapatan pada tiap kepala keluarga yang memiliki mata pencaharian sebagai penggarap. Hal ini berimplikasi terhadap berbagai persoalan yang timbul di masyarakat dimana dibutuhkan program pemberdayaan yang intensif.

Kata kunci : Peralihan fungsi kawasan, Masyarakat, kondisi sosial dan ekonomi

¹)Alumni Universitas Nusa Bangsa

^{2,3})Dosen Universitas Nusa Bangsa

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pada tahun 2003, TNGGP mengalami penambahan luasan yang cukup signifikan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 174/Kpts-II/2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Penunjukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam, Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas pada Kelompok Hutan Gunung Gede Pangrango seluas ± 21.975 (Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Hektar di Provinsi Jawa Barat menjadi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang ditindaklanjuti oleh Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas yang telah diubah menjadi Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari Perum Perhutani Kepada Departemen Kehutanan Nomor 07/SJ/DIR/2009, Nomor BA.6/IV-SET/2009 tanggal 29 Januari 2009 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelolaan Hutan dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten kepada Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Nomor 002/BAST-HUKAMAS/III/2009 - Nomor 1237/II-TU/2/2009 tanggal 6 Agustus 2009 yang termuat di dalamnya petak-petak yang diserahkan dengan total luas 7.655,03 ha.

Oleh karena itu, luas kawasan yang diserahkan oleh Perum Perhutani kepada TNGGP adalah 7.655,030 ha sehingga luas total kawasan sesuai BAST adalah 22.851,030 ha. Sebelum kawasan hutan dialihfungsikan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan diperbolehkan menggarap tanaman tumpang sari di bawah tegakan damar.

Karena kawasan tersebut sudah alih fungsi dari kawasan hutan produksi terbatas menjadi kawasan konservasi tentu saja segala bentuk aktifitas pada kawasan tersebut menjadi ilegal dan liar. Meskipun sudah dinyatakan terlarang, pada kenyataannya masih ada penggarap yang melakukan penggarapan di

lahan/blok-blok yang sebelumnya merupakan kawasan Perum Perhutani.

Desa Ginanjar merupakan desa yang berbatasan langsung dengan daerah perluasan. Beberapa blok yang terdapat di sekitar desa Ginanjar yaitu blok Datar Pari, Toblong, Cipamutih, Langbau, Citamiang, Kiarang Olong, Lembur Pasir, Citamiang, Cipamutih, Ciukir, Bingblu, Lembur Pasir, Ciukir, Pasir Malang, Cikonang, Cipeuteuy, Batu Beulah, Pasir Hantap, Citamleng, Cibitung, dan lainnya (Data Perambahan Total, 2009).

Jumlah luas keseluruhan blok tadi yaitu 143.01 Ha dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang menggarap sekitar 289 KK dengan jenis tanaman garapan yang berupa singkong, buncis, jagung dan padi (Data Perambahan Total, 2009). Hingga tahun 2012 sudah ada beberapa penggarap yang meninggalkan lahan garapan, yaitu pada Blok Cipamutih I, Cipanutih II, Cilimus, Ciukir, Batu Beulah, Cimunjul dengan persentase 20% pada tiap blok.

Pada setiap blok juga terdapat kasus pencurian kayu, pencurian hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berupa getah damar, bermukim di lahan perluasan dan perburuan satwa yang terjadi pada rentang waktu 2011 – 2012 (Peta Tematik Pendukung Pengamanan Hutan Resort PTN Wilayah Pasir Hantap, 2012)

Permasalahan dan kasus di atas merupakan masalah dan tantangan tersendiri bagi TNGGP sebagai pengelola kawasan. Dari berbagai kasus yang terjadi, terlihat jelas bahwa terdapat dampak sosial dan ekonomi akibat perluasan kawasan TNGGP. Oleh karena itu, peneliti ini penting untuk dilakukan.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak peralihan kawasan hutan produksi Perum Perhutani menjadi kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan awal Januari - Februari 2014. Penelitian dilaksanakan di kampung Lembur Pasir, Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Bahan dan Alat

Alat yang digunakan pada kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut: Alat Tulis (Pulpen) dan Kuisisioner (Sebagai Alat Pemandu Wawancara).

Metode Pengambilan Data

Objek pada kegiatan penelitian ini adalah masyarakat Desa Ginanjar. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

Data primer yang diperoleh langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara terhadap Kepala Keluarga (KK) di kampung Lembur pasir yang meliputi Aspek Sosial (Karakteristik masyarakat yaitu umur, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga, pengetahuan, tanggapan, dan interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan) dan Aspek Ekonomi (Mata pencaharian, pendapatan, luas dan kepemilikan lahan garapan).Data sekunder antara lain Kondisi umum lokasi penelitian, Peta perluasan Taman Nasional, Data Rekapitulasi Penggarap, dan berbagai referensi pustaka.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sampel berkelompok (*Cluster Sampling*). Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 100 KK.. Sampel terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok keluarga

penggarap dan kelompok keluarga selain penggarap dengan sampel dari tiap kelompok sebesar 30% sehingga jumlah keseluruhan sampel sebanyak 30 KK (15 KK penggarap dan 15 KK selain penggarap). Pengambilan data secara acak menggunakan kuisisioner yang berisi pertanyaan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat desa sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan.

Analisa Data

Pada penelitian ini dilakukan metode analisis data deskriptif untuk mengetahui dan menganalisis data yang terkumpul dari hasil kuisisioner, wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka (Najir, 1988).

Analisa data data deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan. Data yang terkumpul hasil kuisisioner dinyatakan dalam bentuk tabel karakteristik masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan (mata pencaharian, pendapatan, luas lahan garapan, interaksi masyarakat dengan kawasan hutan, serta pengetahuan dan tanggapan masyarakat mengenai peralihan kawasan hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Karakteristik Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Kepala Keluarga (KK) di kampung Lembur Pasir, dapat disusun klasifikasi karakteristik KK yang dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Karakteristik Masyarakat

Uraian Karakteristik Masyarakat Persentase	Klasifikasi Karakteristik Masyarakat		
	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)
Komposisi umur KK berdasarkan angkatan kerja Persentase	Non produktif muda (< 17 tahun) -	Produktif (17 - 55 tahun) (84%)	Non produktif tua (> 55 tahun) (16 %)
Jumlah anggota keluarga Persentase	Kecil (2 - 4 orang) (77%)	Sedang (5 - 7 orang) (18%)	Besar (>7 orang) (5%)
Tingkat pendidikan formal Persentase	Tidak tamat/tidak mengikuti sd atau tamat sd (100%)	tamat smp atau tamat smu -	tamat perguruan tinggi atau akademi -

Sumber: Data Pengamatan

a. Umur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui sebaran umur Kepala Keluarga di kampung Lembur Pasir. Klasifikasi umur KK di kampung Lembur Pasir berada pada usia produktif dan non produktif. Sebanyak 88% KK berusia produktif (17 – 55 tahun) dan sebanyak 12% merupakan KK berusia non produktif (>55 tahun).

b. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang ada pada setiap KK di kampung Lembur Pasir memiliki karakteristik yang berbeda. Dari jumlah anggota keluarga kecil, sedang dan besar. Jumlah anggota keluarga pada setiap KK di kampung Lembur Pasir, sebesar 77 % merupakan anggota keluarga kecil dengan jumlah dua sampai empat anggota keluarga. Sebesar 18 % merupakan anggota keluarga sedang dengan jumlah lima sampai tujuh anggota keluarga. Sisanya sebesar 5 % merupakan anggota keluarga besar dengan jumlah lebih dari tujuh anggota keluarga.

c. Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saat ini KK di kampung Lembur Pasir berada pada tingkat pendidikan yang rendah (tamat sd), yaitu sebanyak 100%.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Mata Pencaharian Kepala Keluarga

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dari 47 % KK yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai penggarap saja, sebanyak 17 % masih memiliki mata pencaharian sebagai penggarap saja. Selain bertahan dengan mata pencaharian yang lama, terdapat juga KK yang menambah mata pencahariannya, yaitu KK yang sebelumnya hanya menggarap saja, kini memiliki mata pencaharian sebagai penggarap dan berternak dengan jumlah 3 % setelah kawasan hutan dialihfungsikan.

Selain itu terdapat KK yang mengganti mata pencahariannya setelah kawasan hutan dialihfungsikan, yaitu sebagai buruh bangunan (13%), buruh bangunan dan bertani (3%), buruh bangunan dan berternak (3%), guru (3%), dan sopir (3%). Selanjutnya, dari KK yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai penggarap dan penyadap (33%), setelah kawasan dialihfungsikan terdapat 3 % KK yang masih bertahan dengan mata pencaharian yang lama, yaitu sebagai penggarap dan penyadap.

Selain bertahan dengan mata pencaharian yang lama, terdapat juga KK yang bertahan dan menambah mata pencahariannya sesudah kawasan hutan

dialihfungsikan, yaitu memiliki mata pencaharian sebagai penggarap, penyadap, dan usaha warung (3%), serta penggarap, penyadap, dan berternak (7%).

Terdapat juga KK yang sudah tidak lagi menyadap dan atau mengganti mata pencaharian sebagai penyadap dengan mata pencaharian yang lain, yaitu sebagai penggarap dan berternak (3%), penggarap dan buruh bangunan (3%), serta sebagai penggarap saja (7%). Selain itu, terdapat juga KK yang beralih mata pencaharian sesudah kawasan hutan dialihfungsikan, yaitu menjadi pedagang (3%) dan buruh di kota (3%).

Untuk KK yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai penggarap dan buruh pikul (3%), setelah kawasan dialihfungsikan KK tidak lagi menjadi buruh pikul dan mengganti mata pencahariannya menjadi penggarap dan berternak kambing (3%). Hal tersebut dikarenakan setelah kawasan hutan dialihfungsikan, sangat sedikit sekali bidang pekerjaan yang membutuhkan tenaga untuk memikul, terutama untuk memikul kayu tebangan.

Untuk KK yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan, dari 10% KK yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai buruh bangunan sebanyak 7% tetap menjadi buruh bangunan dan sebanyak 7% menambah mata pencahariannya menjadi buruh bangunan dan pengumpul karet sesudah kawasan hutan dialihfungsikan.

Untuk KK yang sebelumnya memiliki mata pencaharian sebagai penjahit (3%) dan berdagang (3%), KK tidak mengganti ataupun menambah mata pencaharian setelah kawasan hutan dialihfungsikan.

b. Peningkatan Jenis Mata Pencaharian

Peralihan kawasan hutan memberikan dampak terhadap jenis – jenis mata pencaharian KK. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari keadaan sebelum peralihan kawasan hutan hanya terdapat 6 jenis mata pencaharian yaitu

sebagai penggarap, penyadap, buruh angkut, buruh bangunan, berdagang dan penjahit.

Setelah kawasan hutan dialihfungsikan, jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh KK bertambah menjadi 13 jenis mata pencaharian yaitu sebagai penggarap, penyadap, buruh bangunan, warung, berternak, buruh di kota, bertani, pengumpul karet, ternak ikan, sopir, berdagang, penjahit, guru. Peningkatan jenis mata pencaharian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peralihan kawasan hutan masyarakat menjadi lebih terdorong untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan usahanya di bidang yang lain.

c. Luas Dan Kepemilikan Lahan Garapan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sebelum peralihan kawasan hutan, sebanyak 20% KK menggarap di kawasan hutan dengan luasan sempit, sebanyak 50% KK menggarap di kawasan hutan dengan luasan sedang, sebanyak 14% KK menggarap di kawasan hutan di kawasan hutan dengan luasan luas, serta sebanyak 16% KK tidak menggarap lahan pribadi/di kawasan hutan.

Akan tetapi, setelah peralihan kawasan hutan, dapat terlihat penurunan persentase pada tiap luasan lahan. Penurunan tersebut yaitu dapat dilihat pada lahan dengan luasan sempit sebesar 16% (dari 20% menjadi 3%), lahan dengan luasan sedang sebesar 10% (dari 50% menjadi 40%), lahan dengan luasan luas sebesar 8% (dari 14% menjadi 6%).

Penurunan tersebut di karenakan keputusan KK untuk meninggalkan lahan garapannya. Persentase KK yang meninggalkan lahan garapan dari tiap luasan, yaitu lahan dengan luasan sempit sebesar 17%, lahan dengan luasan sedang sebesar 10%, lahan dengan luasan luas sebesar 7%. Alasan KK meninggalkan lahan garapannya, yaitu di sebabkan adanya pemberitahuan dari petugas kehutanan mengenai peralihan kawasan

hutan yang membuat kawasan hutan terlarang untuk digarap oleh masyarakat, sehingga KK harus mencari mata pencaharian pengganti.

Selain itu ada juga KK yang meninggalkan lahan garapan di sebabkan lahan garapan yang berkurang kesuburannya dan hama seperti monyet serta babi hutan, sehingga hasil panen pun menjadi menurun. Dengan menurunnya hasil panen berarti pendapatan KK juga berkurang bahkan bisa mengalami kerugian, oleh karena itu KK pun harus beralih mata pencaharian agar pendapatan KK cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

d. Pendapatan

Pendapatan KK di kampung Lembur Pasir berasal dari berbagai mata pencaharian yang dikerjakan oleh KK. Nilai pendapatan KK di kampung Lembur Pasir hanya dapat dituliskan dalam bentuk kisaran angka. Hal tersebut di karenakan sikap KK yang kurang terbuka untuk memberitahukan jumlah pendapatan perbulannya.

Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa sebelum peralihan kawasan hutan KK di kampung Lembur Pasir memiliki kisaran pendapatan Rp 800.000,00 – Rp. 1.500,000,00 per bulan untuk KK yang memiliki mata pencaharian sebagai penggarap (47%), dan kisaran pendapatan Rp 800.000,00 – lebih dari Rp. 1.500,000,00 untuk KK yang memiliki mata pencaharian sebagai penggarap dan penyadap (33 %), penggarap dan buruh pikul (3%). Sedangkan KK yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan (10%), penjahit (3%), dan berdagang (3%) memiliki kisaran pendapatan lebih dari Rp. 1.000.000,00 perbulan.

Setelah adanya peralihan kawasan hutan, kisaran pendapatan KK di kampung Lembur Pasir yaitu sebesar Rp. 500.000,00 – Rp. 1.500.000,00 untuk KK yang bermata pencaharian sebagai penggarap, sebesar Rp. 500.000,00 – lebih dari Rp. 1.500.000,00 untuk KK yang bermata pencaharian sebagai penggarap dan penyadap (3%),

penggarap dan buruh bangunan (3%), penggarap, penyadap dan warung (3%), penggarap, penyadap dan berternak (7%), penggarap dan berternak (10%). serta kisaran pendapatan lebih dari Rp. 1.500.000,00 yaitu untuk KK yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh bangunan (20%), buruh bangunan dan bertani (3%), buruh bangunan dan pengumpul karet (3%), buruh bangunan dan ternak ikan (3%), sopir (3%), berdagang (7%), penjahit konveksi (3%).

Untuk KK yang memiliki mata pencaharian sebagai buruh di kota memiliki kisaran pendapatan lebih dari Rp. 1.500.000,00. Sedangkan KK yang memiliki mata pencaharian sebagai guru memiliki kisaran pendapatan Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00, hal tersebut dikarenakan KK yang memiliki mata pencaharian sebagai guru bukanlah guru yang berasal dari pemerintahan (Pegawai Negeri Sipil) ataupun yayasan tertentu yang mendapatkan gaji bulanan tetap, tetapi KK tersebut merupakan guru yang dibayar seikhlasnya oleh orang tua murid untuk mengajarkan ilmu agama (mengaji) kepada anak - anaknya.

Peralihan kawasan hutan memberikan dampak terhadap pendapatan KK, yaitu menurunnya pendapatan minimum KK sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan. terutama kepada KK yang memiliki mata pencaharian sebagai penggarap. Penurunan tersebut sejumlah Rp. 300.000,00 (dari Rp 800.000,00 menjadi Rp 500.000,00). Penurunan pendapatan tersebut dikarenakan terjadinya gagal panen akibat hama seperti babi dan monyet, serta harga jual panen yang terkadang naik turun.

e. Pengetahuan, Persepsi, dan Interaksi Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa seluruh masyarakat mengetahui adanya peralihan kawasan hutan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai persentase pengetahuan masyarakat yaitu sebesar 100%. Sumber pengetahuan masyarakat yaitu berasal

dari petugas kehutanan yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peralihan kawasan hutan.

Akan tetapi meskipun masyarakat mengetahui tentang peralihan kawasan hutan, masih terdapat KK yang masih menggarap di kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan ketidakmampuan sejumlah KK untuk mencari mata pencaharian pengganti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui berbagai tanggapan masyarakat mengenai adanya peralihan kawasan hutan. Beralihfungsinya kawasan hutan akan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebanyak 33% masyarakat memiliki tanggapan negatif, tanggapan tersebut antara lain seperti “Hutan jangan ditutup, jika ditutup kami mau makan apa”, “Menutup hutan berarti membunuh kami pelan – pelan” dan “Hutan jangan ditutup, buka kembali hutan seperti zaman Perhutani”.

Selain tanggapan negatif, ada juga masyarakat yang menerima kawasan hutan dialihfungsikan yaitu sebanyak 67%. Masyarakat yang menerima peralihan kawasan hutan merupakan masyarakat yang menyadari bahwa lahan yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan mereka bukanlah milik mereka.

h. Interaksi Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan

Peralihan kawasan hutan memberikan dampak terhadap interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Hal tersebut dapat diketahui dari perubahan pemanfaatan hasil hutan oleh KK di kampung Lembur Pasir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebelum peralihan kawasan hutan terdapat hasil dari hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain kayu bakar, getah damar, dan hasil garapan yang berupa singkong, kacang panjang, kumis kucing dan padi, serta buah yaitu pisang.

Dalam pemanfaatannya, terdapat KK yang memanfaatkan satu atau lebih

dari hasil hutan, yaitu diantaranya memanfaatkan kayu bakar (17%), kayu bakar dan singkong (34%), kayu bakar, singkong, dan pisang (3%), kayu bakar, singkong, dan getah damar (30%), kayu bakar, singkong, getah damar, dan kacang panjang (3%), kayu bakar dan kumis kucing (3%), kayu bakar dan padi (10%).

Sesudah peralihan kawasan hutan berbagai jenis hasil hutan dan hasil garapan yang dimanfaatkan oleh KK antara lain kayu bakar (43%), kayu bakar dan singkong (24%), kayu bakar, singkong, dan pisang (3%), kayu bakar, singkong, dan getah damar (10%), kayu bakar, singkong, getah damar, dan kacang panjang (3%), kayu bakar dan kumis kucing (3%), kayu bakar dan padi (7%), serta sebanyak 7% tidak memanfaatkan apapun dari kawasan hutan.

Pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan oleh KK tentu saja berbeda saat sebelum dan sesudah kawasan hutan dialihfungsikan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya penurunan dan peningkatan angka persentasi pemanfaatan hasil hutan. Penurunan tersebut terjadi terhadap KK yang memanfaatkan kayu bakar dan singkong (dari 34% menjadi 24%), kayu bakar singkong, dan getah damar (dari 30% menjadi 10%), kayu bakar dan padi (dari 10% menjadi 7%).

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan terdapat KK yang beralih mata pencaharian. Selain penurunan, kenaikan juga terjadi pada beberapa pemanfaatan hasil hutan yaitu pemanfaatan kayu bakar (dari 17% menjadi 43%). Kenaikan tersebut disebabkan KK yang sudah beralih mata pencaharian tidak lagi memanfaatkan hasil hutan dari lahan garapan, jadi hanya kayu bakar saja yang dimanfaatkan.

Secara keseluruhan dari pemanfaatan hutan, dapat dilihat bahwa sebelum peralihan kawasan hutan seluruh KK (100%) memanfaatkan kayu bakar dari kawasan hutan. Akan tetapi sesudah peralihan kawasan, terdapat KK yang sudah tidak lagi menggunakan kayu

bakar yaitu sebesar 7%. Hal tersebut dikarenakan KK sudah beralih menggunakan kompor yang berbahan bakar gas untuk memasak.

PEMBAHASAN

Dampak Peralihan Kawasan Hutan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Di Sekitar Kawasan Hutan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disusun kondisi sosial ekonomi masyarakat kampung Lembur Pasir sebelum dan sesudah peralihan antara lain:

a. Aspek Ekonomi

Peralihan kawasan hutan berdampak terhadap ekonomi masyarakat yaitu terhadap pendapatan minimal masyarakat, hal itu dapat dilihat dari pendapatan minimal masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penggarap sebelum peralihan kawasan hutan yaitu sebesar Rp. 800.000,00 menjadi Rp. 500.000,00 per bulan setelah kawasan hutan dialihfungsikan.

Hal tersebut dikarenakan sebelum peralihan kawasan hutan, hasil garapan petani belimpah dan jarang mengalami gagal panen. Akan tetapi, kondisi tersebut mengalami perubahan setelah kawasan hutan dialihfungsikan. Banyak hama seperti monyet dan babi hutan merusak tanaman pada lahan garapan, sehingga gagal panen kerap dialami oleh para petani.

b. Aspek Sosial

Dampak sosial yang dialami masyarakat yaitu beralihnya mata pencaharian beberapa Kepala Keluarga di Kampung Lembur Pasir. Sebelum kawasan hutan dialihfungsikan, sebanyak 84% Kepala Keluarga memiliki mata pencaharian sebagai penggarap.

Akan tetapi setelah kawasan hutan dialihfungsikan, sebanyak 34% Kepala Keluarga meninggalkan mata pencaharian sebagai penggarap dan beralih ke mata pencaharian yang lain yaitu sebagai buruh bangunan, pedagang, buruh di kota, sopir dan lainnya.

Peralihan mata pencaharian tersebut dikarenakan Kepala Keluarga sudah merasa pendapatan mereka dari hasil menggarap sudah tidak lagi cukup dan juga pemberitahuan dari petugas bahwa kawasan hutan akan ditutup.

Tidak hanya beralih mata pencaharian, ada juga Kepala Keluarga yang bertahan pada mata pencaharian sebagai penggarap yaitu sebanyak 50%. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya mata pencaharian lain yang dapat menggantikan mata pencaharian mereka sebagai penggarap.

Beralihnya mata pencaharian secara langsung juga mengurangi persentase kepemilikan lahan garapan. Sebelum kawasan hutan dialihfungsikan sebanyak 84% Kepala Keluarga memiliki lahan garapan di kawasan hutan, akan tetapi setelah kawasan dialihfungsikan sebanyak 34% Kepala Keluarga telah meninggalkan lahan garapannya.

Selain itu dampak sosial dapat diketahui dengan adanya peningkatan jenis mata pencaharian yang dimiliki Kepala Keluarga sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari keadaan sebelum peralihan kawasan hutan hanya terdapat 6 jenis mata pencaharian yaitu sebagai penggarap, penyadap, buruh angkut, buruh bangunan, berdagang dan penjahit.

Setelah kawasan hutan dialihfungsikan, jenis mata pencaharian yang dimiliki oleh Kepala Keluarga bertambah menjadi 13 jenis mata pencaharian yaitu sebagai penggarap, penyadap, buruh bangunan, warung, berternak, buruh di kota, bertani, pengumpul karet, ternak ikan, sopir, berdagang, penjahit, guru. Peningkatan jenis mata pencaharian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peralihan kawasan hutan masyarakat menjadi lebih terdorong untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan usahanya dibidang yang lain.

Dampak sosial lainnya yaitu terkait dengan interaksi masyarakat dengan kawasan hutan yaitu berupa pemanfaatan hasil hutan. Sebelum kawasan hutan

dialihfungsikan, 100% Kepala Keluarga memanfaatkan kayu bakar dari kawasan hutan. Akan tetapi setelah kawasan hutan dialihfungsikan, sebanyak 7% Kepala Keluarga sudah tidak lagi menggunakan kayu bakar dikarenakan Kepala Keluarga sudah beralih menggunakan kompor berbahan bakar gas untuk digunakan keperluan rumah tangga sehari – hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian tentang dampak peralihan kawasan hutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa di sekitar kawasan hutan, yakni; Aspek Sosial, *Pertama*, secara umum sebelum kawasan hutan dialihfungsikan sebanyak 84% Kepala Keluarga memiliki mata pencaharian sebagai penggarap serta memiliki lahan garapan di kawasan hutan, lalu setelah kawasan hutan dialihfungsikan sebanyak 34% Kepala Keluarga tidak lagi menggarap serta meninggalkan lahan garapannya; *Kedua*, meningkatnya jenis mata pencaharian yang dimiliki Kepala Keluarga sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan (dari 6 jenis menjadi 13 jenis mata pencaharian);

Aspek Ekonomi, *Pertama* penurunan pemanfaatan kayu bakar oleh Kepala Keluarga sebelum dan sesudah peralihan kawasan hutan (dari 100% menjadi 97% Kepala Keluarga yang memanfaatkan kayu bakar); *Kedua*, terjadi penurunan pendapatan terkecil Kepala Keluarga yang memiliki mata pencaharian sebagai penggarap (dari Rp.800.000,00 sebelum kawasan hutan dialihfungsikan menjadi Rp 500.000,00 setelah kawasan hutan dialihfungsikan).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat diberikan beberapa saran terkait dampak peralihan kawasan hutan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat desa disekitar hutan, yaitu: Penyuluhan, Pelatihan dan Pembinaan Keterampilan Usaha Terhadap Kepala Keluarga

Upaya penyuluhan haruslah dilakukan agar masyarakat menyadari bahwa hutan harus dijaga kelestariannya. Selain itu pelatihan dan pembinaan keterampilan usaha harus diberikan kepada Kepala Keluarga agar pendapatan mereka meningkat. Upaya penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat haruslah dilakukan oleh pihak Taman Nasional yang berkerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha.

Pembentukan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pembentukan UKM sebagai wadah untuk menyalurkan hasil kreatifitas masyarakat yang bernilai ekonomis.

Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah

Pendapatan masyarakat kampung Lembur Pasir tidaklah besar yaitu Rp 500 ribu/bulan – Rp 1.5 juta/bulan. Untuk itu bantuan modal usaha sangatlah dibutuhkan agar pendapatan masyarakat meningkat dan masyarakat tidak lagi menggantungkan pendapatannya dari hasil hutan dan sebagai pengganti lahan garapan yang tidak bisa lagi digarap oleh masyarakat. Bantuan modal usaha tersebut tidaklah dalam bentuk uang, akan tetapi dalam bentuk yang lain seperti hewan ternak (sapi, kambing, dan ayam) dan peralatan yang mendukung untuk mengembangkan usaha serta keterampilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1979. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Edisi Revisi. Yogyakarta
- Beyda, Iyon. 2001. Analisa Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Desa Kinnepen Di Kecamatan Munthe). Universitas Sumatera Utara: Medan
- Departemen Kehutanan. 1986. Buku Informasi Taman Nasional Indonesia. Direktorat aTaman Nasional dan Hutan Wisata.

- Departemen Kehutanan Bogor. Bogor.
- Desa Ginanjar. 2012. Profil Desa Ginanjar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
- Haeruman, Anwar 2005. dampak sosial ekonomi pelaksanaan PHBM di RPH Buniwangi BKPH palabuhanratu KPH sukabumi perum perhutani unit iii jawa barat. Universitas Nusa Bangsa, Bogor
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Online). Tersedia: <http://kbbi.web.id/>. (20 Desember 2013)
- Mubyarto. 1991. Hutan, Perladangan dan Pertanian Masa Depan. PT. Aditya Media. Yogyakarta
- Najir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghaida Indonesia. Jakarta.
- Nur, yuyun. 1993. Dampak Negatif Akibat Pengunjung Terhadap Vegetasi Alami Pada Jalur Antara Penyangga Puncak Gunung Gede di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Universitas Nusa Bangsa. Bogor
- Purwanto. 2011. Fpemangku kepentingan Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan Di Hutan Lindung (Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan, Vol 8, Nomor 4, Desember 2011). Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan, Bogor.
- Resor Pasir Hantap. 2014. Profil Resor Pasir Hantap. Sukabumi.
- Sayogyo. 1977. Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Tangan Lembaga Penelitian Sosial Pedesaan. IPB. Bogor
- Sinaga R dan White. 1979. Beberapa aspek kelembagaan di Pedesaan Jawa dan Hubungan dengan Kemiskinan Struktural, dalam Kemiskinan Struktural. Alfian et al. Edisi Jakarta
- Sholeh, A. Z. 2005 Ilmu Statistika Pendekatan Teoritis dan Aplikasi Disertai Contoh Penggunaan SPSS. Cetakan Ke – 1. Rekayasa Suns. Bandung
- Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1991 Tentang Kehutanan
- Winarto, Bambang. 2012. Kamus Rimbawan. Inter Aksara Prima.
- _____, 2009. Berita Acara Serah Terima Kawasan Produksi Terbatas Perum Perhutani Kepada Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jakarta
- Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.